

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Adys, Abdul. (2018). *“Anomali Korupsi; Napak Tilas Kesejarahan”*. Jambusari, Yogyakarta.
- Adiwilaga. (2018). *“Sistem Pemerintahan Indonesia”*. Budi Utama, Yogyakarta.
- Amin. (2019). *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Budi Utama, Yogyakarta.
- Candra. (2020). *“Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila”*. Nilacakra, Bali.
- Danil. (2021). *“Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberatansannya”*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diatha, Pasek M. (2017). *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Djaja, E. (2010). *“Memberantas Korupsi Bersama KPK”*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar M. (2010). *“Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris”*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamja. (2015). *“Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*. Budi Utama, Yogyakarta.
- Hendarmin, R. (2009). *“Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik”*. Bandung.
- Irfan. (2016). *“Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi”*. P4TIK, Jakarta.
- Jimly. (2010). *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurdi. (2019). *“Hukum Tata Negara Indonesia”*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Marzki, Peter M. (2008). *“Penelitian Hukum”*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Marzuki, Peter M. (2009). *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Prenada Media, Jakarta.
- Marzuki, Peter M. (2014). *“Penelitian Hukum” (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki. (2017). *“Hukum Hak Asasi Manusia”*. Pusham UII, Yogyakarta.
- Muladi, H. (2009). *“Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”*. Refika Adimata, Bandung.
- Muliadi, A. (2019). *“Politik Hukum”*. Akademia Permata, Jakarta.
- Nurjamal. (2023). *“Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana”*. Edu Publisher, Tasikmalaya.

- Pramono. (2022). *“Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum”*. Penerbit Alumni, Jakarta.
- Sahetapy, J. (2017). *“Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum Politik”*. Komisi Hukum Nasional RI.
- Sukiyat. (2020). *“Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi”*. Jakad Media, Surabaya.
- Thaib. (2011). *“Teori Dan Hukum Konstitusi”*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yanto. (2020). *“Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum”*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Yusni. (2019). *“Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan”*. Airlangga University Press, Surabaya.

JURNAL

- Adhayanto. (2011). “Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Volume 2. Nomor 2 (hlm.163).
- Adida. (2023). “Politik Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Dalam Kasus Korupsi”. *Jurnal Universitas Islam Negeri*. Volume 4. Nomor 2 (hlm.16).
- Arifin. (2019). “Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia”. *Jurnal Lex Librum*. Volume 5. Nomor 2 (hlm.892)
- Clement. (2013). “The Continuities Between Executive Power And Prerogative”. *Jurnal Maryland Law Review*. Volume 73. Nomor 15 (hlm.15).
- Donald (2013). “Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Grasi”. *Jurnal Lex Administratum*. Volume 1. Nomor 2 (hlm.51).
- Fauzi, Suyogi Imam. (2021). “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amesti, Dan, Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*. Volume 51. Nomor 3 (hlm.623).
- Hendra. (2015). “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of the Presidential Executive Power)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 12. Nomor 03 (hlm.77).
- Jacoba, Dkk. (2022). “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Patimura*. Volume 2. Nomor 7 (hlm.735).
- Kaharudin. (2016). “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945”. *Jurnal Media Hukum*. Volume 23. Nomor 2 (hlm.141).
- Khairawati, D & Soponyono, E. (2014). “Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Volume 9. Nomor 2 (hlm.2).

- Kurniawan. (2015). "Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana Dalam Pemberian Grasi". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Volume 3. Nomor 1 (hlm.65).
- Mohamad F, F, Karli. (2023). "Analisis Asas Legalitas Dalam Kewenangan Presiden Menunda Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Mary Jane Veloso". *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*. Volume 2. Nomor 4 (hlm.783).
- Muhammad, R, F. (2018). "Analisis Hukum Tentang Pemberian Grasi Terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka Dirinjau dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Eksikloupedia Sosial Review*. Volume 8. Nomor 2 (hlm.46).
- Rannie, Mahesa. (2020). "Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Volume 27. Nomor 2 (hlm.101).
- Rai. (2021). "Analisa Hukum Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun". *Jurnal Eksikloupedia Sosial Review*. Volume 3. Nomor 2 (hlm.183).
- Rizky. (2015). "Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri Oleh Presiden". *Jurnal Yuridika*. Volume 30. Nomor 1 (hlm.118).
- Setiadi. (2018). "Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 15. Nomor 3 (hlm.251).
- Sujatmiko & Wibowo, W. (2021). "Urgensi Pembentukan Ragulasi Grasi, Amesti, Abolisi, dan Rehabilitasi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 21. Nomor 1 (hlm.96).
- Sulistyowati. (2014). "Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Conference Paper dan Seminar Korupsi*. Volume 1. Nomor 1 (hlm.9).
- Sonata, Depri Liber. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum". *Jurnal Hukum*. Volume 8. Nomor 1 (hlm.22).
- Tilman, D, G. (2020). "Konstitusionalitas Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi". *Universitas Kristen Satya Wacana*. Volume 3. Nomor 2 (hlm.144).

INTERNET

- Chaerul, R. (2017). "Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana". Makassar, Universitas Negeri Islam (UNI), hlm.97. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a16e01fb73000fce1aa5/eksistensi-grasi-menurut-perspektif-hukum-pidana/>, Diunduh pada 27 Agustus 2023.
- Hukum Online. (2020). "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah dan Prinsipnya". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622>. Diunduh pada 7 Januari 2024.

Iwan Soetijono. (2019). “*Pertimbangan MA dan DPR dalam Pemberian Grasi , Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi*”. hlm.20. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertimbangan-ma-dan-dpr-dalam-pemberian-grasi--rehabilitasi--amnesti--dan-abolisi-lt5c7bac21ae930>, Diunduh pada 3 Desember 2023.

Kompas. (2019). “*Jokowi Sebut Grasi untuk Koruptor Annas Maamun atas Pertimbangan MA dan Mahfud MD*”. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/16473651/jokowi-sebut-grasi-untuk-koruptor-annas-maamun-atas-pertimbangan-ma-dan>. Diunduh pada 7 Januari 2024.

Kompas. (2019). “*Tiga Grasi Jokowi Sebelum Diberikan ke Annas Maamun*”. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/06140071/tiga-grasi-jokowi-sebelum-diberikan-ke-annas-maamun?page=all>. Diunduh pada 7 Januari 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Memberikan Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 106).